

AGROEKOLOGI

Vol. 30 No. 2, April 2011

DAFTAR ISI

Pemanfaatan Albedo Kulit Jeruk Nambangan Sebagai Bahan Dasar Manisan Kering Dengan Perlakuan Perendaman CaCO_3 (Hesti Nur'aini).....	641
Analisa Saluran Pemasaran Gula Merah di Kecamatan Lebong Selatan (Rita Feni dan Suryadi).....	650
Pengaruh Optimalisasi Bibit dan Pupuk Kandang Ayam Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Padi Intensifikasi SRI (Masdar).....	656
Kontribusi Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Terhadap Pendapatan Petani Peternak di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong (Novitri Kurniati dan Rin Harini).....	664
Berbagai Panjang Setek dan Tingkat Konsentrasi Zat Tumbuh Terhadap Pertumbuhan Setek Panili (<i>Vanilla Flanifolia</i>) (Adnan).....	672
Perbaikan Teknologi Budidaya Nilam (<i>Pogostemon Cablin Benth</i>) dengan Menggunakan Varietas Unggul di Provinsi Aceh (Idawanni dan Fenty Ferayanti). ..	677
Pengaruh Lama Simpan dan Media Simpan Dalam Ruang Simpan AC Terhadap Viabilitas Benih Salak (<i>Salacca Zalacca</i>) (Eka Suzanna).....	255
Pengaruh Pupuk Hayati Cair dan Penyiraman Terhadap Karakter Morfologi Bibit Kelapa Sawit Umur 4 - 6 Bulan (Tatik Raisawati).....	692
Penerapan Teknologi SRI Organik (<i>System of Rice Intensification Organic</i>) Dengan Memanfaatkan Limbah Pertanian Pada Budidaya Tanaman Padi Sawah di Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan (Diah Ristiani dan Nurbaiti Amir).....	700
Faktor Penyebab Rendahnya Kesejahteraan Petani Kecil dan Upaya Mengatasinya (Nyayu Neti Arianti dan Indra Siregar).....	706
Tepung Kentang dengan Perlakuan Variasi Suhu dan Lama Pengeringan (A.D. Muzado).....	714
Strategi Pengembangan Kehutana Sosial (<i>social Forestry</i>) dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (Siswahyono).....	719
Organisme Perusak Pascapanen dan Pengendaliannya (Sunarti).....	729

ISSN : 1412 - 100 x

STRATEGI PENGEMBANGAN KEHUTANAN SOSIAL (*SOCIAL FORESTRY*) DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG

(Kasus Hutan Lindung Boven Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu)

Oleh :

Siswahyono

(Staf Pengajar Jurusan Kehutanan Faperta Universitas Bengkulu)

MENGESAHKAN

Salinan Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal:

Kabag. Tata Usaha

Ir. Akhmad Nezar

Nip. 19621127 198903 1002

ABSTRACT

The research is conducted in forest protection Boven Lais area and it's surrounding villages. Basic method used in this research is survey method with interview to obtain social-economic cultural data of people, and survey groundcheck technique to obtain biogeophysics data of forest area. The data was analysed using descriptive analysis.

Encroachment and illegal cutting was happened in forest protection Boven Lais area which boundary with villages. Intense destructive interaction due to aspects of region development which have not been accommodate in the forest management. Based on strategy of social forestry as a reference to formulate the goal of forest management, result showed that there are three subsystem : forestry, agricultura and social economic, influencing in the forest management. Several aspect which causing the failure of the forest management were (1). the local community need for furniture Wood can not be fulfill from agricultural land, (2). illegal cutting as a part of job opportunity in the cover unemployment, and (3). encroachment by local community because extensification of agricultural.

Keywords : forest management, protection forest, encroachment, social forestry

PENDAHULUAN

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Anonim, 1999). Dengan fungsi utama tersebut, pemanfaatan hutan lindung tidak mengijinkan adanya kegiatan penebangan atau pengambilan kayu dari dalam kawasan, apalagi mengubah peruntukan lahannya untuk usaha budidaya tanaman semusim.

Namun kegiatan perambahan hutan untuk pertanian masyarakat dan pencurian kayu sebagai salah satu bentuk kegiatan destruktif terhadap pemanfaatan sumber daya hutan lindung, telah terjadi di sebagian

kawasan hutan lindung di Propinsi Bengkulu. Kegiatan perambahan hutan dilakukan dengan cara menebang pohon, membakar dan dilanjutkan menanam komoditas tanaman semusim, kopi dan jenis lainnya. Kegiatan ini akan menyebabkan siklus unsur hara untuk sementara waktu berhenti, mengingat kesuburan tanahnya sangat bergantung pada bahan organik yang dihasilkan vegetasi di atasnya. Heterogenitas jenis dan struktur vertikal vegetasi penutup lahan tanaman budidaya yang lebih rendah dibandingkan vegetasi hutan alam, menyebabkan kesuburan lahan tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama dan usaha tani kurang menguntungkan secara ekonomis. Lahan yang sudah kurus akan ditinggalkan dan akan membuka lahan kebun baru.

Menurunnya kemampuan kawasan hutan produksi untuk menghasilkan kayu pertukangan, telah menjadikan kawasan hutan lindung sebagai salah satu alternatif sumber penghasil kayu oleh masyarakat dengan menebang secara *illegal*. Kemudahan mencuri kayu dari kawasan hutan lindung, tidak bisa dipisahkan dari cara pemerintah dalam mengelola hutan itu sendiri. Hutan lindung selama ini dapat dikatakan "*tidak dikelola*" oleh pemerintah. Tidak dikelolanya kawasan hutan lindung oleh pemerintah, mungkin lebih disebabkan karena hutan lindung tidak memberikan manfaat ekonomi dibandingkan kawasan hutan produksi.

Kegiatan pengelolaan hutan lindung oleh pemerintah masih merupakan bentuk awal dari kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan lindung Boven Lais dan Bukit Sanggul antara lain penataan batas, penyusunan rencana pengelolaan, pengamanan hutan dan inventarisasi hutan. Kegiatan pengamanan hutan yang dilakukan dengan operasi-operasi di lapangan dengan melarang kurang efektif dalam mencegah terjadinya pencurian kayu.

Fragmentasi fungsi kawasan hutan dengan menempatkan kawasan hutan lindung sebagai penyangga sistem kehidupan seperti yang telah disebut di atas, telah menyebabkan masyarakat di sekitar kawasan hutan kehilangan akses dalam memperoleh manfaat ekonomi (*fungsi produksi*) atas sumber daya hutan. Sementara di pihak lain, masyarakat memerlukan manfaat ekonomi (produksi) hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu pertukangan, energi (kayu bakar) dan lapangan pekerjaan. Ketidaksesuaian antara aturan dalam pengelolaan hutan lindung yang ada selama ini dengan realitas kebutuhan masyarakat di sekitar hutan yang harus dipenuhi dari pemanfaatan hasil hutan, sangat merugikan kepentingan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hutan lindung dan kesejahteraan masyarakat.

Terjadinya perambahan dan pencurian kayu dalam kawasan hutan lindung juga dapat menjadi indikator telah terjadi

konflik atau interaksi yang kuat antara masyarakat dengan dengan pengelolaan hutan sehingga perlu pendekatan baru dalam mengelola hutan. *Social forestry* atau kehutanan sosial dipandang sebagai konsep baru dalam pengelolaan hutan. Sebagai konsep paradigma baru, kehutanan sosial memandang bahwa pengelolaan hutan merupakan pengelolaan ekosistem. Sebagai suatu ekosistem, hutan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dibeda-bedakan menurut fungsinya. Jadi setiap kawasan hutan melekat fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Ragam pengelolaan hutan perlu diimplementasikan di tingkat tapak, yang didasarkan pada intensitas masalah sosial ekonomi masyarakat dan keadaan bio-fisik kawasan.

Sebagai wujud dalam implementasi dari *social forestry*, Departemen Kehutanan telah menjadikan *social forestry* menjadi payung dalam pelaksanaan berbagai programnya. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No : P.01/Menhut-II/2004, *Social forestry* adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang member kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh informasi kondisi biofisik kawasan hutan lindung dan masyarakat desa di sekitarnya sebagai salah satu bentuk system pembangunan wilayah tingkat desa, yang dapat dijadikan dasar perumusan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung yang menjamin fungsi ekonomi, ekologi dan fungsi sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi serta fakta-fakta dari gejala di lapangan. Menurut Faisal (2006), suatu survey bisa digunakan untuk tujuan-tujuan

skriptif dan juga untuk tujuan-tujuan splanasi.

Lokasi Penelitian di kawasan Hutan lindung (HL) Boven Lais yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Kemumu di Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu. Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yang didasarkan ada informasi awal bahwa lokasi penelitian tersebut telah mengalami kerusakan akibat perambahan maupun pencurian kayu. Pengambilan sampel responden sebanyak 10% dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di desa, dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Luas kawasan hutan lindung Boven Lais adalah 28.600 Ha. Penunjukkan kawasan Boven Lais dan Bukit Sanggul sebagai kawasan hutan lindung telah dimulai sejak jaman Pemerintahan Belanda. Mengingat penunjukannya pada zaman Pemerintahan Belanda, maka pemerintahan pribumi di lokasi sekitar kawasan hutan saat itu masih berbentuk pemerintahan marga. Dali (2008) menyatakan kawasan hutan yang ditunjuk pemerintah Belanda disebut juga dengan "*gimbo larangan*" dan masyarakat marga yang merambah kawasan hutan akan dikenai sanksi yang disebut "*dendo adat*".

Fungsi hidrologi kawasan hutan lindung Boven Lais telah memberikan manfaat bagi keperluan irigasi persawahan dan perikanan air tawar di Kelurahan Kemumu. Adanya irigasi tersebut menjadikan Kelurahan Kemumu sebagai salah satu sentra produksi beras untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagai kawasan hutan lindung, maka dalam pengelolaannya melarang penebangan pohon untuk mengambil kayunya. Disamping sebagai sumber air untuk irigasi lahan pertanian, fungsi hidrologi kawasan hutan lindung

Boven Lais juga menjadi sumber penyediaan air bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Hasil survei pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi perambahan hutan di lokasi yang berbatasan langsung dengan kedua desa. Perambahan di kedua lokasi penelitian telah mengubah penutupan lahan vegetasi hutan menjadi tanaman budidaya yang didominasi jenis tanaman pokok kopi dan yang dikombinasikan dengan jenis tanaman lainnya seperti nilam, pinang dan tanaman semusim.

Sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan hutan Boven Lais mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Yang dimaksud mata pencaharian disini adalah mata pencaharian yang menjadi sandaran utama masyarakat untuk memperoleh baik uang maupun pangan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian sumber daya lahan dan tenaga, merupakan sumber daya modal utama untuk memenuhi kebutuhannya. Mata pencaharian lain yang dilakukan masyarakat sekitar hutan lindung Boven Lais antara lain pedagang, pengrajin/tukang, swasta dan lain-lain.

Pendekatan Perumusan Masalah Dalam pengelolaan Hutan Lindung Boven Lais

Pengelolaan kawasan hutan lindung Boven Lais tidak bisa dipisahkan dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat, baik yang tinggal di dalam maupun yang berada di sekitarnya. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahun berimplikasi secara langsung terhadap peningkatan kebutuhan dasar yang umumnya dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan dan lahan. Hal ini juga ditegaskan oleh Muraille (1990), yang menyatakan bahwa ekosistem hutan merupakan bagian dari ekosistem pedesaan.

Merujuk konsepsi Muraille tersebut, maka pengelolaan hutan sudah seyogyanya menempatkan masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan menjadi bagian

tak terpisahkan dari aktivitas mengelola hutan. Kesadaran ini sebenarnya juga secara eksplisit sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan kawasan hutan yang berada di Indonesia. Diadopsinya Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) (Anonim, 2007) dalam pembangunan dan pengelolaan hutan di Indonesia merupakan bentuk penjabaran dari konsepsi masyarakat sekitar hutan sebagai bagian tak terpisahkan dalam pengelolaan hutan atau hutan sebagai bagian dari ekosistem pedesaan.

Sebagai bagian dari ekosistem pedesaan, dengan sendirinya kawasan hutan tidak bisa terhindar dari berbagai komponen penyusun ekosistem pedesaan yang lain seperti manusia (sosial ekonomi masyarakat), pertanian, peternakan, industri dan lainnya sesuai karakteristik di mana kawasan hutan itu berada. Demikian juga kawasan hutan lindung Boven Lais yang berbatasan langsung dengan lahan pertanian masyarakat desa-desa di sekitarnya.

Adanya perambahan hutan dan pencurian kayu dalam kawasan hutan lindung Boven Lais menunjukkan bagaimana komponen sosial ekonomi masyarakat yang menjadi bagian ekosistem pedesaan mempengaruhi komponen sumber daya hutan. Pengaruh sosial ekonomi masyarakat yang dapat dikatakan bersifat destruktif terhadap hutan akan berakibat terganggunya keseimbangan ekosistem pedesaan dalam jangka panjang. Atau dengan kata lain kegiatan perambahan dan pencurian kayu akan berpengaruh terhadap sumber daya hutan dan pada akhirnya mengakibatkan terganggunya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial sumber daya hutan.

Konsep sumber daya hutan bagian dari ekosistem pedesaan dapat diadopsi dengan menempatkan sistem pembangunan wilayah tingkat desa/kelurahan sebagai dasar perumusan pengelolaan hutan lindung Boven Lais. Sumber daya hutan merupakan bagian dari sistem pembangunan wilayah, sehingga sub sistem pembangunan selain kehutanan

ikut diperhitungkan sebagai bagian yang berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya hutan. Sub sistem pembangunan lain yang dipandang mempunyai kaitan erat dengan pengelolaan hutan lindung Boven Lais adalah : sub sistem sosial masyarakat dan sub sistem pertanian.

Sub Sistem Kehutanan

Kaitannya dengan pengelolaan kawasan hutan lindung Boven Lais, Pemerintah telah menetapkan dan mengukuhkannya, namun kegiatan tersebut tidak diikuti oleh kegiatan lain yang memadai. Pengamanan hutan merupakan kegiatan yang paling mudah untuk dilakukan, namun tidak efektif dalam mencapai tujuan kegiatan. Pemanfaatan hasil hutan non kayu seperti rotan, damar, gaharu dalam kawasan hutan lindung yang berlangsung beberapa puluh tahun lalu dan tidak diikuti kegiatan permudaan, telah menyebabkan potensi hasil hutan tersebut mulai menurun, kecuali getah damar yang masih mampu dihasilkan dari tegakan pohon damar yang tidak ditebang.

Dengan fungsi utama sebagai pengatur hidro-orologi (tata air), pencegah banjir dan tanah longsor, kawasan hutan lindung Boven Lais seharusnya tidak boleh dilakukan aktivitas penebangan, apalagi pembukaan lahan untuk membudidayakan tanaman semusim atau monokultur lainnya. Namun dipihak lain masyarakat sekitar hutan memerlukan lahan garapan dan lapangan kerja akibat terjadinya pertambahan penduduk. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bidang kehutanan saat ini, dimana penebangan dan pembukaan lahan tidak diperbolehkan. Pemerintah hanya mengizinkan pemanfaatan hasil hutan non kayu seperti rotan, getah dan buah-buahan. Sedangkan potensi getah dan rotan dalam kawasan hutan lindung Boven Lais sekitar Kelurahan Kemumu sudah sangat langka. Pohon penghasil getah damar, umumnya sudah sangat jarang dijumpai di dalam kawasan hutan, mengingat pohon penghasil getah tersebut umumnya memiliki kualitas

ngi Pengembangan Kehutanan
ahyono)

yang relatif baik, baik kelas awet pun kelas kuatnya sehingga telah anfaatkan untuk kayu pertukangan.

Pada tahun 2006 Pemerintah melalui as Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten gkulu Utara telah melakukan upaya oisasi pada lahan yang mengalami usakan akibat perambahan. Upaya oisasi dalam proyek Gerakan Rehabilitasi tan dan Lahan (yang lebih dikenal dengan utan "Gerhan"). Jenis tanaman yang anam antara lain Petai (*Parkia speciosa*), mbang lanang, dan Melinjo (*Gnetum emon*). Jenis tanaman petai, damar mata cing dan melinjo diharapkan dapat enggantikan peran ekonomi bagi tanaman ang dibudidayakan perambah yaitu tanaman opi. Demikian juga pada tahun 2008, di alam kawasan hutan lindung Boven Lais ang dekat dengan Kelurahan Kemumu juga ilaksanakan kegiatan reboisasi (gerhan) dengan jenis tanaman kayu bawang, mahoni dan karet. Tanaman karet dipilih sebagai salah satu jenis MPTS dalam reboisasi tersebut agar masyarakat dapat

memanfaatkan getah karet dari kawasan hutan lindung.

Sub Sistem Pertanian

Sub sistem pertanian di wilayah sekitar hutan lindung Boven Lais sangat didukung oleh sub sistem kehutanan. Dibangunnya irigasi teknis yang berhulu sungai di dalam kawasan hutan lindung Boven Lais menuntut adanya kelestarian sumber daya hutan, agar fungsi pengatur tata air (hidro-orologis) dapat berjalan sehingga air tersedia dalam jumlah yang cukup untuk mengairi lahan khususnya sawah yang berada di bawahnya.

Pada tahun 2007, rasio pemilihan lahan masyarakat di kelurahan Kemumu masih di atas kebutuhan lahan normal 0,79 ESTH/KK. Walaupun angka kebutuhan minimum lahan untuk seluruh kelurahan dapat dipenuhi, namun adanya kepemilikan lahan milik yang tidak merata dan sifat usaha tani lahan sawah yang bersifat musiman, menyebabkan sebagian warga yang tidak memiliki lahan mencari lahan baru yaitu di dalam kawasan hutan.

Tabel 2. Rasio Pemilikan Lahan Masyarakat kelurahan Kemumu

Responden	Σ Responden	Luas Lahan milik	Rata-rata (ha/KK)	Rasio (ESTH/KK)*
Non Perambah	34	54,25	1,595	2,393
Perambah hutan	26	7,17	0,276	0,414

Sumber : Hasil Pengolahan data primer, 2008

* diasumsikan lahan milik berupa sawah dikalikan 1,5 ESTH

Angka pemilihan lahan para perambah relatif kecil, mengingat tidak semua perambah memiliki lahan di luar kawasan hutan. Dari 26 responden, hanya 15 responden yang memiliki lahan milik di luar kawasan hutan. Ketidadaan lahan milik di luar kawasan hutan dan terbatasnya lapangan kerja di sektor pertanian dan di luar sektor pertanian, responden mencari lahan garapan baru yaitu di dalam kawasan hutan.

Kelurahan Kemumu memiliki lahan sawah seluas 368 ha, tegal/ladang 69,15 ha

dan tanah perkebunan rakyat seluas 175 ha. Lahan dalam kelurahan tersebut merupakan sumber utama penghidupan bagi warga kelurahan Kemumu. Tanaman padi dan jagung adalah jenis utama yang dibudidayakan masyarakat di kelurahan kemumu pada lahan milik yang berupa sawah. Sedangkan lahan kebun dan tegal dibudidayakan tanaman kopi, coklat, karet dan sebagian kecil tanaman penghasil buah-buahan seperti durian, petai, pinang, kayu manis dan pisang.

Sub Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat

Akar permasalahan keadaan sosial ekonomi masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di sekitar atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan, harus diidentifikasi sebagai bagian penentu dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Beberapa variabel kondisi keadaan sosial ekonomi masyarakat yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain : lapangan pekerjaan dan angkatan kerja dan kebutuhan dasar masyarakat.

Rasio kepemilikan lahan merupakan indikator nyata yang mencerminkan ketersediaan lapangan kerja dan pengangguran di wilayah pedesaan yang menggantungkan hidupnya sebagian besar dari usaha bertani. Semakin tinggi rasio kepemilikan lahan, maka lapangan kerja masih tersedia di Kelurahan. Namun sebaliknya, semakin kecil rasio kepemilikan lahan, maka terjadinya pengangguran tidak bisa dihindari, apabila tidak ada diversifikasi usaha seperti penciptaan lapangan kerja baru di luar sektor pertanian.

Terjadinya pengangguran dapat dihitung berdasarkan perbedaan antara luas areal pertanian sekarang dan luas areal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Hardjosoediro (1977), dalam keadaan normal satu keluarga petani dapat mengerjakan sawah tadah hujan seluas 0,7 ha dan tegal 0,3 ha. Sedangkan Simon (1994) menyatakan bahwa untuk daerah dengan

tanah pertanian yang relatif kurang subur, luas lahan minimum yang dibutuhkan oleh satu keluarga setara dengan 0,79 ha ekuivalen sawah tadah hujan (ESTH).

Mengingat ketersediaan lahan di Kelurahan Kemumu terbagi dalam kategori lahan sawah (irigasi teknis) dan lahan kering (kebun kopi, kebun kakao, kebun karet), maka dalam penelitian ini kebun diasumsikan setara dengan tegal. Sedangkan 1 ha lahan sawah irigasi teknis diasumsikan setara dengan 1,5 ha sawah tadah hujan. Simon (1983) menggunakan ukuran 1 ha tegal atau pekarangan setara dengan 0,3 sawah tadah hujan. Penggunaan pendekatan ini lebih didasarkan kepraktisan dalam menganalisis bagi penulis, mengingat adanya kondisi yang berbeda antara lahan pertanian di Jawa dengan di lokasi penelitian.

Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, maka kebutuhan lahan minimum satu keluarga di Kelurahan lokasi penelitian dihitung setara dengan 0,79 ekuivalen sawah tadah hujan. Dari jumlah penduduk yang dinyatakan dalam satuan kk (kepala keluarga) dapat dihitung jumlah luas lahan pertanian minimum (dalam ESTH) yang diperlukan oleh masyarakat petani di desa-desa sekitar hutan lindung Boven Lais, yaitu : jumlah KK dikalikan dengan 0,79 ha ESTH. Dari hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Kemumu masih terjadi *surplus* terhadap kebutuhan lahan pertanian minimum..

Tabel 3. Luas lahan pertanian dan Kebutuhan Minimum lahan pertanian Masyarakat di Kelurahan Kemumu

Σ KK	Luas Sawah	Luas Kebun dan Tegal	Total ESTH	ESTH minimum	Keterangan
382*	368	244,15	625,2	301,78	Surplus
574**	368	244,15	625,2	453,46	Surplus

Sumber : Hasil pengolahan, 2008

* : petani dan buruh

** : seluruh penduduk diasumsikan sebagai petani

Dalam penelitian ini, kebutuhan bahan pangan tidak dihitung berdasarkan

hasil survei, tetapi menggunakan angka normatif. Angka normatif kebutuhan pangan

per kapita didekati dengan konsumsi beras per kapita yaitu sebesar 0,35 kg/hari (Simon, 1994). Oleh karena itu, kebutuhan pangan masyarakat di lokasi penelitian merupakan hasil perkalian antara jumlah penduduk Kelurahan Kemumu dikalikan dengan angka normatif tersebut. Asumsi yang lain, bahwa

rata-rata produksi beras yang dihasilkan dari lahan sawah yang berada di kelurahan tersebut adalah 60 karung/ha/musim tanam atau setara dengan beras 3.240 Kg/ha/musim atau 9.720 kg/ha/tahun. Hasil perhitungan besarnya produksi dan konsumsi beras disajikan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Konsumsi dan Produksi Beras dalam Satu Tahun Masyarakat di Kelurahan Kemumu

Σ Jiwa	Konsumsi Beras (Kg)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Produksi (Kg)	Selisih Produksi - Konsumsi (Kg)	Ket.
2.210	282.327,5	368	1.192.320	909.992,5	Surplus

Sumber : Hasil pengolahan, 2008

Berdasarkan tabel di atas, di lokasi penelitian mengalami *surplus* beras sebesar 909.992,5 kg/tahun. Angka *surplus* ini menunjukkan bahwa Kelurahan Kemumu sebagai sentra penghasil beras di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian, kebutuhan dasar pangan dapat dipenuhi oleh Kelurahan Kemumu sendiri. Setiap anggota masyarakat memerlukan rumah untuk tempat tinggalnya. Adanya pertambahan penduduk akan menyebabkan bertambah pula jumlah rumah yang harus

dibangun. Peningkatan jumlah rumah berakibat kenaikan jumlah kayu yang dibutuhkan untuk membangunnya. Tingginya kebutuhan kayu yang dibutuhkan untuk membangun rumah akan menyebabkan produksi kayu yang harus dihasilkan dari sumber daya hutan juga semakin meningkat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penaksiran di lapangan, diperoleh data volume kayu yang terpasang pada masing-masing tipe rumah sebagai berikut :

Tabel 5. Volume kayu pertukangan untuk masing-masing tipe rumah.

No.	Alokasi Penggunaan	Ukuran kayu (cm)	Volume Kayu Terpasang (m ³ /rumah)		
			Sederhana	Semi permanen	Permanen
1.	Rangka dinding	8x10x400	0,26	1,381	-
2.	Dinding	2x25x400	2,095	2,01	-
3.	Kuda-kuda atap	8x10x400	0,405	0,369	0,57
4.	Kasau	5x7x400	0,339	0,317	0,47
5.	Reng	4x6x400	0,313	0,307	0,338
6.	Plafon	1x122x244	0,638	0,142	0,324
7.	Kusen pintu	7x14x400	0,164	0,053	1,076
8.	Kusen jendela	7x14x400	0,198	0,221	0,655
9.	Skor penguat	5x7x400	0,062	0,030	0,020
<i>Jumlah</i>			4,474	4,83	3,453

Sumber :Hasil pengamatan dan penaksiran, 2008

Berdasarkan Tabel 5 di atas, rata-rata untuk membuat rumah memerlukan kayu pertukangan sebesar 4,252 m³/rumah. dengan

asumsi masa pakai kayu pertukangan adalah 50 tahun dan rata-rata jumlah jiwa setiap rumah adalah 4 jiwa/KK, maka kebutuhan

kayu pertukangan per kapita di lokasi penelitian adalah $0,0212 \text{ m}^3/\text{jiwa}/\text{tahun}$. Namun apabila masa pakai kayu pertukangan diasumsikan selama 30 tahun, maka kebutuhan kayu pertukangan per kapita di lokasi penelitian adalah $0,0354 \text{ m}^3/\text{jiwa}/\text{tahun}$ atau $78,234 \text{ m}^3/\text{tahun}$ untuk seluruh Kemumu.

Berdasarkan uraian sub sistem kehutanan, sub sistem pertanian dan sub sistem sosial ekonomi masyarakat di lokasi penelitian, maka keragaan pembangunan wilayah kelurahan Kemumu kaitannya dengan pengelolaan hutan lindung Boven Lais adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Keragaan Produksi dan Konsumsi Penyusun Sistem pembangunan di Wilayah Kelurahan Kemumu

Jenis Kebutuhan	Produksi		Konsumsi Sub Sistem Sosial Ekonomi	Surplus/defisit
	Sub Sistem Pertanian	Sub system Kehutanan		
Pangan (kg beras)	1.192.320	0	282.327,5	Surplus
kayu pertukangan (m^3)	Kecil**	0	78,234	defisit
Lapangan kerja (ESTH)	625,2	0*	453,46	surplus

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Walaupun lapangan kerja masih surplus, namun adanya mekanisasi pertanian dalam penggarapan sawah diduga telah mengurangi kemampuan menyerap tenaga kerja yang ada di desa.

Strategi Kehutanan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Lindung Boven Lais

Berdasarkan pendekatan perumusan masalah tersebut di atas, maka perlu reorientasi terhadap tujuan utama pengelolaan hutan lindung. Biofisik kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama sebagai penyangga system kehidupan, tidak harus menutup akses masyarakat dalam memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya hutan yang ada. Bentuk/model pengelolaan hutan di tingkat tapak harus dirumuskan kembali, agar masyarakat dapat memperoleh manfaat secara langsung dari sumber daya hutan. Masyarakat desa di sekitar kawasan hutan tidak bisa dipisahkan dari sumber daya hutan yang ada.

Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat dipilih sebagai salah satu bentuk kelembagaan pengelolaan hutan lindung Boven Lais. Adanya kelembagaan Hutan Desa atau hutan

Kemasyarakatan menjadikan kawasan hutan lindung jelas pengelolanya di lapangan. Persepsi masyarakat bahwa hutan lindung seolah-olah “tidak dikelola” akan memperoleh kepastian pemangkunya di lapangan.

Untuk mendukung pengembangan Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan tersebut, beberapa hal dasar yang harus dipenuhi antara lain :

1. Kepastian hukum wilayah hutan yang akan dikelola

Kepastian hukum wilayah hutan yang akan dikelola ini penting, mengingat kawasan hutan dipandang “open acces” oleh semua anggota masyarakat, akibat tidak adanya pengelola hutan di tingkat tapak. Kepastian hukum menyangkut kepastian ruang kelola dan waktu pengusahaan, agar masyarakat memperoleh kepastian di masa depannya.

2. Masyarakat sekitar hutan sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan

Kenyataan bahwa masyarakat sekitar hutan telah mengenal karakteristik kawasan

hutan dan daya dukungnya, sehingga akan memudahkan dalam perumusan tujuan perencanaan pengelolaan hutan dan model-model pendayagunaan lahan di tingkat tapak apabila mereka menjadi pelaku utama. Penempatan masyarakat sebagai pelaku utama menjadikan tujuan pengelolaan hutan dapat memenuhi kebutuhan/keinginan masyarakat, sehingga akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam menjaga dan mewujudkan kelestarian sumber daya hutan.

3. Pemerintah desa/kelurahan sebagai coordinator usaha pengelolaan hutan di setiap wilayahnya

Pemerintahan desa/kelurahan merupakan lembaga pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, namun eksistensinya sering terabaikan dalam pengelolaan hutan. Kepemimpinan kepala desa merupakan tokoh panutan bagi sebagian besar masyarakat desa, sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan.

Sejarah peranan pemerintahan desa sekitar hutan saat pemerintahan marga (jaman Pemerintahan Belanda), telah terbukti mampu mengamankan kawasan hutan lindung, harus menjadi kesadaran bersama perlunya peran pemerintahan desa dalam kegiatan pengelolaan hutan (Siswahyono, 2006).

4. Fasilitator teknis dalam pengelolaan hutan

Perambahan lahan dalam kawasan hutan lindung harus diarah ke pola pemanfaatan lahan yang menjamin kelestarian fungsi utama hutan lindung. Budidaya tanaman kopi dan nilam yang banyak dijumpai dalam kawasan hutan lindung harus ditinggalkan, diganti dengan tanaman pohon yang mampu menghasilkan produk non kayu.

Kombinasi tanaman pohon meranti (*Shorea javanica*) sebagai penghasil getah damar mata kucing dengan karet merupakan salah satu kombinasi yang dapat diterapkan dalam teknik rehabilitasi hutan. Kombinasi ini juga telah diakomodasikan dalam pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) tahun 2007, Namun kombinasi ini belum diimplementasikan dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan lindung dan masyarakat sendiri belum mengetahui. Oleh karena itu fasilitasi sangat penting dilakukan untuk mengakselerasi pengelolaan hutan lindung.

5. Mitra

Sumber daya modal dan pemasaran menjadi seringkali menjadi kendala manakala masyarakat sekitar hutan lindung akan melaksanakan pengusahaan dan pengelolaan hutan lindung. Pengadaan bibit (meranti, karet) merupakan salah satu contoh kendala bagi masyarakat sekitar hutan lindung Boven Lais untuk mengganti tanaman kopi di lahan perambahannya. Oleh karena itu diperlukan mitra, baik pemerintah maupun swasta agar pendayagunaan lahan oleh masyarakat desa sekitar hutan dalam kawasan hutan lindung bisa lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perambahan dan pencurian telah terjadi dalam kawasan hutan lindung Boven Lais yang berbatasan langsung dengan wilayah Desa/Kelurahan Kemumu. Ketiadaan pemilikan lahan pertanian bagi sebagian anggota masyarakat dalam sub system pertanian, telah mendorong masyarakat untuk merambah kawasan hutan lindung
2. Rendahnya produksi kayu yang dihasilkan dalam sub sistem pertanian berakibat terjadinya defisit kayu dalam memenuhi kebutuhan kayu sebesar 78,234 m³/tahun dari sub sistem sosial ekonomi masyarakat dalam sistem

pembangunan wilayah desa, berakibat masyarakat memanfaatkan hasil kayu dalam kawasan hutan lindung. Sementara sub sistem kehutanan tidak mengijinkan pemanfaatan kayu dari kawasan hutan yang ada.

- }. Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan bentuk kelembagaan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan lindung Boven Lais

Pemilihan kombinasi jenis tanaman oleh masyarakat dan sesuai kaidah-kaidah pengelolaan hutan lindung secara lestari perlu dilakukan penelitian agar bisa dijadikan acuan dalam kegiatan pendayagunaan lahan oleh perambah.

Terima kasih Pebri Herlina yang telah membantu dalam penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dibiayai oleh Hibah Penelitian Dosen Muda Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1999. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta
- Anonim, 2001. Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pembangunan Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya. Jakarta
- Dali, B. 2008. Kabupaten Seluma dalam Problema Masyarakat Desa Pedalaman. Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma.
- Sayogyo. 1996. Psikologi Pedesaan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Senoaji, G. Siswahyono dan Erniwati. 2001. Studi Daya Dukung Lingkungan Desadesa Sekitar Hutan Lindung Ditinjau dari Aspek Ekologi, Ekonomi dan Kelestarian Hutan. Laporan penelitian DIKS Universitas Bengkulu.

Simon, H. 1994. Merencanakan Pembangunan Hutan Untuk Strategi Kehutanan Sosial. Seri Kajian MR. Aditya Media, Yogyakarta.

Simon, H. 2006. Membangun Kembali Hutan Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Siswahyono. 2006. Studi Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung Berbasis Masyarakat. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. *(tidak dipublikasikan)*